

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dibahas tentang teori yang akan mendasari penelitian ini. Pembahasan ini akan menjadi panduan dalam memahami secara mendalam untuk memecahkan permasalahan yang ada. penelitian ini mencakup teori Kemiskinan, jumlah penduduk, Gini Ratio, dan teori pendidikan.

#### 2.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan (Maipita,2014). Maipita mengutip pendapat Chambers yang menyatakan bahwa pengertian dari kemiskinan tergantung dari siapa yang bertanya memahami dan merespon tentang kemiskinan. Menurut kuncoro (2006) kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Perspektif ini membagi makna kemiskinan menjadi beberapa kelompok diantaranya sebagai berikut:

1. Kelompok yang melihat kemiskinan dari segi pendapatan (*income-poverty*), karena kesulitan dalam pengukuran sehingga dilihat juga dari sisi pengeluaran (*consumption-poverty*). Para pakar ekonomi cenderung menggunakan konsep ini, dimana melihat kemiskinan dari sudut pandang pendapatan dan pengeluaran (konsumsi).
2. Kelompok yang memaknai kemiskinan dari kekurangan materi, konsep ini mengartikan kemiskinan sebagai kurangnya kekayaan, rendahnya kualitas aset seperti akses komunikasi, tempat tinggal dan akses

transportasi, dan rendahnya akses terhadap fasilitas lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.

3. Kelompok ini berdasarkan pendapat dari Amartya Sen yang menyatakan kemiskinan sebagai kekurangan dan ketidakmampuan yang ditandai dengan ketidakmampuan fisik, dimensi sosial, dan kekurangan material.
4. Kelompok ini mengartikan konsep kemiskinan sangat luas, yaitu mencakup kekurangan multidimensi.

Menurut BPS (2015), berdasarkan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan merupakan besaran pengeluaran dalam pengukuran makanan dan non makanan. Nilai garis kemiskinan yang digunakan BPS mengacu kepada kebutuhan minimum setara 2100 kalori perkapita perhari ditambah dengan kebutuhan minimum, penduduk dikatakan miskin jika berada dibawah garis kemiskinan yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik. Menurut Bank Dunia (2013) dalam Kuncoro (2006), kondisi seseorang dapat dikatakan miskin apabila pendapatannya kurang dari standar pendapatan tertentu. Pendekatan yang digunakan Bank Dunia yaitu pendekatan moneter yang digunakan oleh sejumlah negara untuk menetapkan standar kemiskinan. Ukuran kemiskinan Menurut Nurske, 1953 dalam Kuncoro (1997) secara sederhana yang umum digunakan dapat diebadakan menjadi tiga sebagai berikut :

### 1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan yang dihubungkan atas tingkat pendapatan dan kebutuhan. tingkat kebutuhan biasanya dapat dibatasi pada kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan individu dapat hidup layak. Ketika pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, maka individu tersebut dikatakan miskin. Kemiskinan dapat diukur dari membandingkan tingkat pendapatan individu dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya.

### 2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan yang dihubungkan dengan adanya masalah distribusi pendapatan (ketimpangan). Ketika pendapatan seseorang sudah sampai target tingkat kebutuhan minimum, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan pendapatan masyarakat sekitar, maka individu masuk ke dalam kategori miskin.

### 3. Kemiskinan Kultural

Seseorang tergolong miskin kultural jika sikap orang atau sekelompok masyarakatnya tidak ingin berusaha memperbaiki tingkat kehidupan sekalipun usaha dari pihak lain yang bersedia membantu atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin diakibatkan oleh sikapnya sendiri yang pemalas dan tidak ingin memperbaiki kondisinya.

### 2.1.1 Indikator Kemiskinan

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan dan digunakan sebagai dasar teori. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan dua macam pendekatan, yaitu *Head Count Index* (HCI) dan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan *basic needs approach* melihat kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan *Head Count Index* adalah presentase penduduk dibawah garis kemiskinan atau pengukuran menggunakan kemiskinan absolut. *Head Count Index* merupakan ukuran kemiskinan yang paling sering digunakan dan ukuran kemiskinan ini menganggap pendapatan diantara penduduk bersifat homogen. Menurut Maipita (2014). Kelemahan dari ukuran kemiskinan dengan *Head Count Index* ini adalah tidak dapat melihat tingkat keparahannya dan tingkat keparahan hanya dapat menunjukkan miskin dan tidak miskin. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) garis kemiskinan dibedakan menjadi tiga bagian sebagai berikut:

1. Garis kemiskinan adalah pengukuran untuk mengetahui jumlah penduduk miskin, dengan menjumlahkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk miskin.
2. Garis kemiskinan non makanan ialah merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori per hari. Komoditi kebutuhan dasar dibagi menjadi 52 jenis komoditi.

3. Garis kemiskinan non makanan merupakan kebutuhan minimum untuk pendidikan, perumahan, sandang, dan kesehatan. Komoditi kebutuhan dasar non makanan dibagi menjadi 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi dipedesaan (BPS, 2014).

Indikator lain yang bisa digunakan sebagai pengukuran kemiskinan yaitu seperti: *Poverty Gap Index*, *Sen Poverty Index*, *Foster-Greer-Thorbecke (FGT)*, *Poverty Severity Index*, dan *Watts Index*.

1. *Poverty Gap Index* adalah alat ukur dengan menggunakan besaran distribusi pendapatan orang miskin terhadap garis kemiskinan. Menurut Bank Dunia (2007) dalam Kuncoro (2013) ukuran ini menggambarkan tingkat kedalaman kemiskinan (*the depth of poverty*) tetapi tidak dapat menunjukkan keparahan kemiskinan (*the severity of poverty*).
2. *Sen Poverty Index* merupakan ukuran kemiskinan yang dikemukakan oleh Sen pada tahun 1976 dengan menggambarkan presentase penduduk miskin dan menggambarkan kedalaman kemiskinan, serta distribusi pendapatan diantara penduduk miskin yang menggunakan faktor koefisien gini dan rasio H (Budiantoro, 2016).
3. *Foster-Greer-Thorbecke (FGT)* adalah ukuran kemiskinan yang dinyatakan oleh *Foster-Greer-Thorbecke (1984)* dalam Maipita (2014) dengan adanya masuknya unsur derajat kemiskinan dari individu termiskin melalui parameter  $\alpha$ . Ukuran ini sangat terkenal digunakan dalam penelitian mengenai sensitivitas kemiskinan terhadap kedalaman dan keparahan kemiskinan.

4. *Poverty Severity Index* adalah ukuran kemiskinan dengan memberi nilai yang lebih besar bagi penduduk dalam kelompok sangat miskin dan mengkuadratkan jarak garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara diantara penduduk miskin (BPS, 2017).
5. *Watts Index* adalah ukuran kemiskinan yang diperkenalkan oleh Watts (1968) yang merumuskan pengukuran kemiskinan dengan membagi garis kemiskinan berdasarkan pendapatan sehingga relatif lebih adil dan terdapat akumulasi kemiskinan (Maipita, 2014).

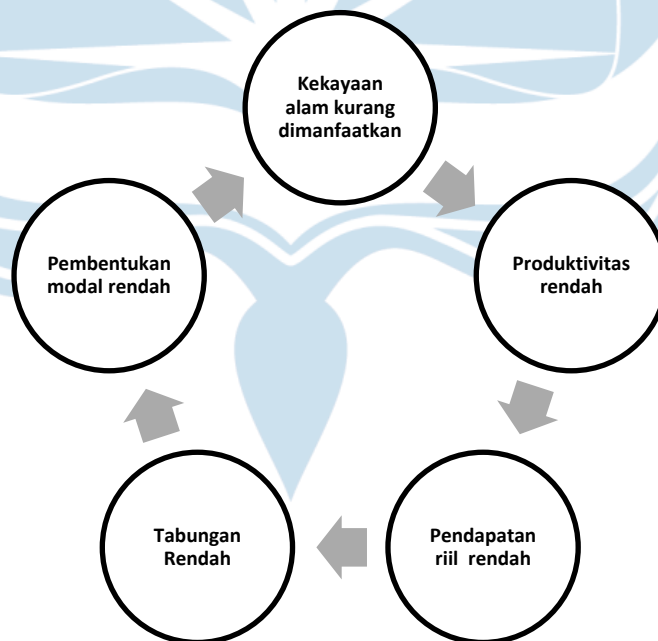
### **2.1.2 Penyebab Kemiskinan**

Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengenai penyebab kemiskinan. Menurut Kuncoro (1997) ada tiga penyebab kemiskinan yang dapat dilihat dari sisi ekonomi. Tiga penyebab kemiskinan tersebut antara lain:

1. Secara mikro, ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang dapat menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan dan hal ini merupakan penyebab munculnya kemiskinan. Sumber daya yang dimiliki penduduk miskin jumlahnya terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah akan berdampak pada produktivitas yang rendah sehingga upah yang didapatkan rendah. Penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia adalah karena rendahnya pendidikan, adanya diskriminasi, nasib yang kurang beruntung, dan faktor keturunan.

3. Kemiskinan muncul karena adanya perbedaan akses dalam modal.

Penyebab lain terjadinya kemiskinan adalah karena adanya lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Menurut Nurkse (1953) dalam Arsyad (1997) menyatakan bahwa lingkaran setan kemiskinan merupakan pola yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan kondisi dimana sebuah negara akan tetap berada pada kategori miskin dan akan mengalami kesulitan untuk mencapai pembangunan yang lebih tinggi. Menurut Nurske (1953), lingkaran kemiskinan muncul bukan karena tidak terdapat pembangunan pada suatu negara, tetapi permasalahan ini muncul karena adanya halangan yang besar dalam proses pembentukan modal.



Sumber: Arsyad (2015:113)

**Gambar 2. 1**  
**Lingkaran Kemiskinan Versi Nurkse**

Meier dan Baldwin (1957) dalam Arsyad (2015) menyatakan bahwa konsep tentang lingkaran kemiskinan muncul akibat hubungan saling mempengaruhi antara kondisi masyarakat tradisional yang belum mampu memanfaatkan secara penuh sumber daya yang tersedia. Konsep lingkaran kemiskinan menganggap bahwa suatu negara yang mengalami kondisi kemiskinan secara terus menerus disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan baik.
2. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan produktivitas rendah.
3. Kurangnya faktor pendukung kegiatan penanaman modal.

Menurut Bappenas (2012) penyebab kemiskinan dibagi menjadi dua macam yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor adat atau budaya yang telah tertanam sehingga membelenggu dalam sekelompok masyarakat yang mengakibatkan terus melekatnya kemiskinan. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap suatu tatanan sosial sehingga masyarakat tidak dapat memiliki akses untuk terbebas dari kemiskinan.

## **2.2 Penduduk**

Penduduk adalah faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam perencanaan wilayah. Jumlah penduduk adalah faktor utama untuk dapat menentukan banyaknya permintaan bahan konsumsi yang harus disediakan,

begitu banyaknya fasilitas umum yang harus dibangun disuatu wilayah tertentu (Tarigan 2005, h185).

Menurut Badan Pusat Statistik (2014) Penduduk yaitu mereka yang berdomisili diwilayah geografis Republika Indonesia selama waktu enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan definisi yang ada diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal di daerah tersebut dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan terdaftar dalam data penduduk didaerah tersebut.

### **2.2.1 Pertumbuhan penduduk**

Pertumbuhan penduduk yaitu keseimbangan antara *power* yang menambah dan *power* yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu Fertilitas (kelahiran), Mortalitas (kematian), dan Migrasi (perpindahan penduduk) (Ajie 2008, h 41).

#### **a. Fertilitas (Kelahiran)**

Fertilitas merupakan performa seseorang wanita melahirkan jumlah bayi hidup. Dalam penafsirannya orang cenderung menyamakan antara konsep fertilitas dengan fekunditas, padahal fekunditas merupakan kemampuan biologis seorang wanita melahirkan bayi hidup. Fekunditas adalah lawan dari steril atau mandul. Persamaan fertilitas dengan fekunditas adalah selalu dikaitkan dengan masa reproduksi wanita. Masa reproduksi wanita dimulai sejak datangnya menstruasi pertama sampai menopause.

#### **b. Mortalitas (Kematian)**

Mortalitas atau kematian merupakan aspek kajian kependudukan yang sangat penting untuk menyusun suatu program kesehatan. Mati ialah keadaan menghilangnya semua tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Data mengenai kematian sangat diperlukan antara lain untuk proyeksi penduduk guna perencanaan pembangunan, misalnya perencanaan pemberdayaan ekonomi, fasilitas perumahan, dan lainnya. Data kematian juga diperlukan sebagai nilai keberhasilan program-program kebijaksanaan penduduk.

c. Migrasi

Migrasi adalah perpindahan dari suatu daerah ke daerah yang lain atau suatu Negara ke Negara yang lain. Penduduk yang datang ke daerah baru disebut *Imigran*, sedangkan penduduk yang pindah ke daerah baru atau yang keluar dari suatu daerah disebut *Emigran*.

### 2.2.2 Tahap Pertumbuhan Penduduk

Tahap pertama antara tahun 1900 sampai dengan tahun 1920 adalah periode dimana tingkat perkembangan penduduk lambat. Dalam tahap ini penduduk tidak selalu berkembang adakalanya jumlah penduduk mengalami kemunduran yang timbul sebagai akibat bahaya kelaparan atau wabah penyakit. Ciri –ciri lain dan lebih penting dari tahap ini adalah terdapatnya tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Kedua faktor ini menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk rendah.

Tahap kedua yaitu akhir tahap pertama hingga tahun 1950 merupakan periode yang ditandai dengan penurunan tingkat kematian, tetapi tingkat kelahiran tidak

mengalami perubahan. Faktor yang menyebabkan penurunan tingkat kematian tersebut adalah kemajuan dalam bidang kedokteran dan perluasan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Tahap ketiga yaitu sesudah Perang Dunia II, tingkat kematian mengalami penurunan lebih lanjut sedangkan tingkat kelahiran tetap tidak mengalami perubahan yang berarti, sebagai akibatnya, pada tahun sesudah Perang Dunia II perkembangan penduduk dinegara berkembang mencapai suatu tingkat yang jauh lebih tinggi dari masa sebelumnya (Sukirno 2006, h. 80).

### **2.2.3 Teori Peralihan Penduduk**

Teori peralihan kependudukan didasarkan pada kecenderungan penduduk sebenarnya di negara maju di dunia. Menurut yang ada pada teori ini, setiap Negara selalu melewati tiga tahap dalam pertumbuhan penduduk yang berbeda. Pada tahap pertama, angka kelahiran, begitu juga dengan angka kematian tinggi dan laju pertumbuhan penduduk rendah. Pada tahap kedua, angka kelahiran akan tetap stabil tetapi angka kematian turun dengan sangat cepat, akibatnya laju pertumbuhan penduduk meningkat pesat. Pada tahap yang terakhir, angka kelahiran akan mulai menurun dan cenderung sama dengan angka kematian dan berdampak pada laju pertumbuhan penduduk akan sangat rendah. C.P Blaker menyatakan lima bukan tiga, yaitu 1) fase stasioner tinggi yang ditandai oleh angka fertilitas dan mortalitas tinggi, 2) fase pengembangannya awal yang ditandai oleh fertilitas tinggi dan mortalitas tinggi tapi menurun, 3) fase pengembangan akhir dengan fertilitas menurun tetapi dengan mortalitas yang menurun lebih cepat, 4) fase stasioner rendah dengan fertilitas rendah yang

berimbang dengan mortalitas yang sama-sama rendah, dan 5) fase penurunan dengan mortalitas rendah, fertilitas lebih rendah dan lebih tinggi kematian daripada kelahiran (Jhingan 2012, h 410).

### **2.3 Pendidikan**

Pendidikan merupakan jembatan untuk menuju masa depan suatu bangsa. Karena itu pendidikan menyangkut karakter pembangunan dan pertahanan jati diri seseorang dalam suatu bangsa. Seseorang di haruskan memiliki pendidikan setinggi-tingginya agar dia bisa mendapatkan pekerjaan. Saat seseorang bekerja dan mendapatkan gaji yang tinggi maka harus memiliki pendidikan yang tinggi pula. Karena jika pendidikan tinggi maka bisa memenuhi kebutuhan seseorang (Amalia, 2012).

Menurut Prayitno (1986) pendidikan bertujuan untuk mencetak manusia-manusia yang berkualitas tinggi yang membutuhkan pendanaan yang cukup tinggi baik dari pemerintah maupun masyarakat. Adapun macam-macam pendidikan antara lain:

1. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang dilembagakan seperti pendidikan dari SD sampai Perguruan Tinggi.
2. Pendidikan non formal yaitu kegiatan terorganisasi dan sistematis yang penyelenggaranya diluar kerangka sistem pendidikan formal.

Pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) Pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek-obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat

individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya.

Teori Pendidikan oleh T.W.Schultz berpendapat bahwa perkembangan suatu masyarakat pada umumnya berlandaskan investasi, dan pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas manusia, baik dalam arti perkembangan intelektual maupun keterampilan profesional.

### **2.3.1 Faktor-Faktor dalam Pendidikan**

Di dalam pendidikan terdapat beberapa faktor yang ada dan berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Beberapa ahli telah mencoba mengemukakan faktor-faktor pendidikan secara berbeda-beda. (*Ibid*, :126-127).

#### **1. Menurut Cryus**

Ada tiga faktor utama yang mendukung tercapainya pendidikan yaitu:

- a) Faktor pendidikan
- b) Faktor anak didik
- c) Faktor pergaulan mendidik

Dalam pendidikan harus mempunyai tiga faktor diatas. Pendidikan harus ada pendidik, yaitu orang yang bertanggung jawab atas pertumbuhan anak, baik itu orangtua, guru, atau pemimpin masyarakat. Di dalam pendidikan harus ada anak yang di didik, yaitu mereka yang harus ditolong agar pertumbuhan mereka mencapai tingkat dewasa. Dengan adanya dua faktor ini, pendidik belum bisa berlangsung. Pendidikan masih memerlukan satu faktor lagi, yaitu pergaulan pendidik dalam arti pergaulan yang dapat membawa anak didik ke tingkat dewasa.

## 2. Menurut Langeveld

Seluruh pendidikan yang ada dapat ditinjau dari bagian-bagian yaitu:

- a) Mendidik, yakni melakukan tindakan dengan sengaja untuk menapai tujuan pendidikan.
- b) Pergaulan.
- c) Alam sekitar.

Dengan beusaha mempelajari pengertian pendidikan dan bagian-bagiannya seperti yang dikemukakan oleh Langeveld diatas adapun faktor-faktor pendidikan yaitu:

- a) Orang dewasa
- b) Anak yang belum dewasa
- c) Pergaulan
- d) Tindakan mendidik
- e) Alam sekitar

### **2.3.2 Tingkat atau Jenjang Pendidikan**

Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kesulitan bahan pengajaran dan cara untuk menyajikan bahan pengajaran (Drs. H. Fuad Ihsan : 2005:22). Jenjang pendidikan formal seperti yang tertuang dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, BAB VI Pasal 14 yang menyatakan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

#### 1. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan di dalam masyarakat, serta untuk mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar pada umumnya merupakan pendidikan yang memberikan bekal dasar untuk perkembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun masyarakat. Oleh karena itu, bagi setiap warga negara harus berkewajiban memperoleh pendidikan dasar. Pendidikan ini dapat berupa pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, dan dapat disebutkan sebagai pendidikan biasa atau luar biasa.

## 2. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan melakukan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan yang lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah umum diselenggarakan selain untuk mempersiapkan peserta didik mengikuti pendidikan tinggi, juga untuk memasuki lapangan kerja. Pendidikan menengah kejuruan diselenggarakan untuk memasuki lapangan kerja atau mengikuti pendidikan profesi pada tingkat yang lebih tinggi. Pendidikan menengah dapat merupakan pendidikan biasa atau pendidikan luar biasa.

## 3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan tinggi yang bersifat akademis dan atau profesional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan dan untuk menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan manusia (Kepmendikbud No. 0186/P/1984).

#### **2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB adalah nilai tambah yang mampu diciptakan dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah, istilah PDRB adalah gabungan dari empat kata. Pertama adalah produk yang berarti seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa. Kedua adalah domestik yang berarti perhitungan nilai produksi yang telah dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai penduduk atau bukan. Ketiga adalah regional, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan. Terakhir adalah bruto yang bermakna perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan (Saberan, 2002:5).

##### **2.4.1 Cara Penghitungan PDRB**

Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu langsung dan tidak langsung (alokasi).

##### **A. Metode langsung**

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh dari melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Rincian penjelasannya sebagai berikut:

#### 1. Menurut Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto setiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu (satu tahun) (BPS, 2012:26). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu:

- a. Pertanian
- b. Pertambangan dan penggalian
- c. Industri pengolahan
- d. Listrik, gas, dan air bersih
- e. Bangunan
- f. Perdagangan, hotel, dan restoran.
- g. Pengangkutan dan komunikasi
- h. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
- i. Jasa-jasa

#### 2. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir. Komponen-komponen tersebut meliputi:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swastayang tidak mencai untung.
- b. Konsumsi pemerintah
- c. Pembentukan model tetap domestik bruto.
- d. Perubahan stok
- e. Ekspor *neto* (BPS, 2012:27)

### 3. Menurut Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut dalam proses produksi didalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Produk Domestik Regional atas Dasar Harga Konstan

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksinya atau pengeluaran dan pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini akan menjamin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya. (BPS, 2012:27).

- b. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian disuatu wilayah. Nilai tambah yang dimaksud merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi (BPS, 2012:27).

#### **B. Metode Tidak Langsung atau Metode Alokasi**

Dalam metode ini PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini digunakan beberapa alokator antara lain: nilai produksi bruto atau netto setiap sektor /subsektor pada wilayah yang dialokasikan ; jumlah produksi fisik ; tenaga kerja; penduduk, dan alokator tidak langsung lainnya. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat diperhitungkan presentase bagian masing-masing provinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor. Cara penyajian PDRB adalah sebagai berikut :

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. (BPS, 2012:28).

2. PDRB Atas Harga Konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. (BPS, 2012:28)

PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yaitu suatu proses kenaikan output nasional suatu periode tertentu terhadap periode sebelumnya. Dalam perkembangannya terdapat banyak teori mengenai pertumbuhan ekonomi, antara lain: teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan neoklasik.

#### **2.4.2 Teori pertumbuhan ekonomi**

##### **A. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik**

Para ahli ekonomi klasik telah menganalisis masalah-masalah perkembangan perekonomian dalam jangka panjang dan mengetahui berbagai macam proses perkembangannya (Sukirno, 2000: 448-450). Berikut ini merupakan pembahasan teori pertumbuhan ekonomi oleh para ahli ekonomi klasik

1. Pandangan Adam Smith

Adam Smith mengemukakan indikator yang dianggap penting perannya dalam penentu suatu pertumbuhan ekonomi. Analisis yang pertama, pasar bebas yang memiliki peran dimana pasar bebas akan memainkan perannya dalam meningkatkan kegiatan perekonomian yang lebih efisien dan kuat. Kedua, perluasan pasar ke berbagai perusahaan yang meningkatkan

konsumsi masyarakat dan mendapatkan keuntungan. Ketiga, spesialisasi yang menimbulkan kemajuan teknologi dalam kegiatan perekonomian dengan mendukung perluasan pasar dan meningkatkan produktivitas dengan menggunakan perkembangan teknologi modern untuk mendukung produktivitas para pekerja dan mencapai perluasan pasar yang lebih luas lagi.

## 2. Pandangan Malthus dan Ricardo

Malthus dan Ricardo mengemukakan perkembangan pertumbuhan ekonomi berada pada subsistem, dimana tenaga kerja yang digunakan lebih banyak dibandingkan dengan faktor produksi lain, dengan demikian akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pada saat pertumbuhan penduduk semakin berkembang tetapi tidak dengan peningkatan sumber daya yang lain maka tingkat kesejahteraan yang akan dicapai rendah.

## 3. Teori Schumpeter

Teori ini mengemukakan analisa terbarunya yang menyatakan bahwa inti dari pertumbuhan ekonomi adalah sebab konjungtur. Pertumbuhan ekonomi tidak berlangsung dengan terus menerus tetapi juga pada saat tertentu mengalami kelambatan. Konjungtur disebabkan karena para pelaku usaha sebelum melakukan berbagai inovasi dalam usahanya untuk menghasilkan barang maupun jasa membutuhkan suntikan investasi.

## 4. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar untuk melengkapi analisis Keynes yang menyatakan bahwa penentuan tingkat kegiatan ekonomi secara agregat dapat menjadi penentu peningkatan suatu kegiatan perekonomian. Keynes menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan dapat menentukan tingkat pendapatan nasional. Sedangkan analisis Harrod-Domar menyatakan bahwa akibat yang ditimbulkan dalam investasi akan menyebabkan peningkatan jumlah barang-barang modal dan jumlah barang-barang modal tersebut harus menunjukkan peningkatan permintaan agregat.

#### **B. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik**

Teori ini menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tidak didasari melalui permintaan masyarakat melainkan melihat seberapa jauh perkembangan perekonomian tergantung dari peningkatan faktor produksi dan kemajuan teknologi (Jhingan, 2004:265). Ahli ekonomi yang menjadi pencetus dari pengembangan teori tersebut diantaranya yaitu:

##### 1. Teori J.E.Meade

Profesor J.E. Meade mengemukakan bahwa untuk membangun suatu model pertumbuhan ekonomi neo-klasik dapat dijelaskan melalui bentuk paling mendasar yaitu sistem ekonomi akan berkembang selama proses pertumbuhan mencapai keseimbangan.

## 2. Teori Solow

Untuk mengetahui maju tidaknya suatu perekonomian dibutuhkan adanya suatu alat pengukur yang tepat. Alat pengukur pertumbuhan ekonomi ada beberapa macam diantaranya yaitu:

### a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk domestik bruto merupakan jumlah barang akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.

### b. Produk Domestik Bruto Per Kapita (pendapatan perkapita)

Produk domestik bruto perkapita merupakan jumlah PDB nasional dibagi dengan jumlah penduduk.

### c. Pendapatan Per Jam Kerja

Pendapatan perjam kerja merupakan upah atau pendapatan yang dihasilkan per jam kerja. Biasanya suatu negara yang mempunyai tingkat pendapatan atau upah jam kerja lebih tinggi daripada dinegara lain, bisa dikatakan negara yang bersangkutan lebih maju daripada negara yang satunya.

## 2.5 Gini Ratio

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan pendapatan merupakan kondisi dimana tingkat pendapatan antar individu tidak merata. Gini rasio dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam menggambarkan tingkat ketimpangan di Indonesia.

Koefisien gini menurut BPS didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu pada kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran gini ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila gini ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila gini ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi.

Ketimpangan memiliki dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif sendiri dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2011).

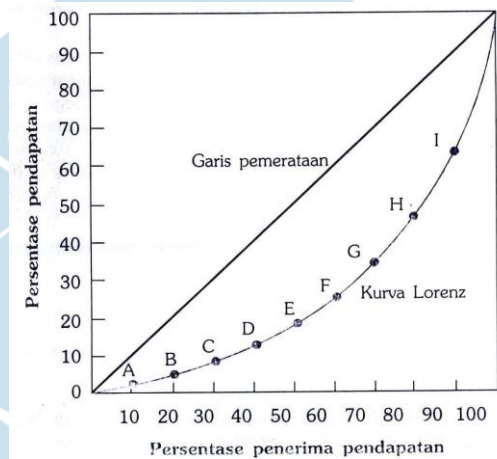
### **2.5.1 Kurva Lorenz**

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional dikalangan lapisan penduduk. Kurva ini terletak didalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datanya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat kedagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia semakin

mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata. (Lincoln Arsyad, 1997

**Gambar 2.2**

**Kurva Lorenz**



### 2.5.2 Indeks Gini

Pendapatan atau ukuran berdasarkan koefisien Gini atau Gini ratio dikemukakan oleh C.GINI yang melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Rumus yang dipakai untuk menghitung nilai Gini Ratio adalah :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10000}$$

Keterangan :

$G$  = Gini Ratio

$P_i$  = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke- $i$

$Q_i$  = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas- $i$

$Q_{i-1}$  = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke- $i$

$k$  = Banyaknya kelas pendapatan

Nilai Gini antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan.

Namun pada studi empiris terutama pada *single country*, ternyata kemiskinan tidak identik dengan kesejahteraan. Artinya pada ukuran diatas belum mencerminkan tingkat kesejahteraan. Studi yang dilakukan oleh Ranis (1977) dalam Tulus Tambunan (2001) mengemukakan bahwa di Republik Cina dan Ravallion dan Datt (1996) dalam Tulus Tambunan (2001) mengemukakan bahwa di India, menunjukkan kedua negara tersebut dilihat dari tingkat pendapatan perkapita maupun ukuran Gini (Gini Ratio) menunjukkan tingkat kemiskinan yang cukup parah, namun dilihat dari tingkat kesejahteraan, kedua negara tersebut masih lebih baik dari beberapa negara Amerika Latin yang mempunyai tingkat Gini Ratio rendah dan tingkat tingkat pendapatan perkapita tinggi. Ranis, Ravallion dan Datt memasukkan faktor seperti tingkat kemudahan mendapatkan pendidikan yang murah, hak mendapatkan

informasi, layanan kesehatan yang mudah dan murah, perasaan aman baik dalam mendapatkan pendidikan dan lapangan kerja, dll.

Intinya adalah dalam mengukur kemiskinan, banyak variabel non keuangan yang harus diperhatikan. variabel keuangan (tingkat pendapatan) bukan satu-satunya variabel yang harus dipakai dalam menghitung kemiskinan. Namun dalam mengambil keputusan, lebih menitik beratkan pada *cross variable study* dalam mengatasi masalah kemiskinan, maka berarti kemiskinan akan diatasi dengan cara meningkatkan kesejahteraan dalam arti luas.

### **2.5.3 Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan**

Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah adalah sebagai berikut (Tambunan, 2001) :

#### **1. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah**

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas mempengaruhi ketimpangan antar wilayah pertumbuhan ekonomi daerah yang cenderung lebih cepat sehingga terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena adanya sumber daya alam yang lebih banyak di daerah tertentu : minyak bumi, gas, batu bara, dan bahan mineral lainnya. Disamping itu terdapatnya lahan yang subur juga mempengaruhi, khususnya menyangkut dengan pertumbuhan pertanian. Kedua, meratanya fasilitas transportasi baik darat, laut dan udara juga turut mempengaruhi konsentrasi kegiatan antar daerah. Ketiga, kondisi demografis atau

kependudukan juga mempengaruhi sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

## 2. Alokasi Investasi

Investasi adalah salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi. Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintah daerah yang dianut. Sedangkan alokasi investasi oleh swasta dipengaruhi oleh kekuatan pasar.

## 3. Tingkat Mobilitas Faktor Produksi Yang Rendah Antar Daerah

Mobilitas barang dan jasa yang kurang lancar dapat mendorong terjadinya ketimpangan antar wilayah. ketimpangan bisa terjadi karena beberapa alasan diantaranya adalah mobilitas yang kurang lancar dapat menyebabkan kelebihan produksi suatu daerah sehingga tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya ketimpangan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak bisa dimanfaatkan oleh daerah lain sehingga proses pembangunan menjadi terbelakang.

## 4. Perbedaan Sumber Daya Alam

Penyebab pertama yang mendorong ketimpangan antar wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan, daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Dengan kondisi tersebut akan mendorong perbedaan pembangunan ekonomi di setiap daerah yang nantinya akan menimbulkan ketimpangan antar wilayah, daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang banyak akan cenderung lebih baik pembangunan ekonominya sedangkan daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang sedikit akan cenderung lebih lambat pembangunannya.

#### 5. Perbedaan Kondisi Demografis

Demografis setiap daerah berbeda sehingga menyebabkan ketimpangan antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksud yaitu meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Kondisi demografis menyebabkan ketimpangan antar wilayah karena hal ini berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah

yang bersangkutan. Kondisi demografis yang kurang baik akan menyebabkan rendahnya produktivitas kerja masyarakat yang akan berdampak pada pembangunan ekonominya, begitu pula sebaliknya jika produktivitas kerja masyarakat tinggi maka akan berdampak pada pembangunan ekonomi yang tinggi pula. Hal ini terjadi karena, dengan produktivitas kerja yang tinggi akan mendorong investor untuk melakukan investasi di daerah tersebut.

#### 6. Kurang Lancarnya Perdagangan

“kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga merupakan unsur yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional di Indonesia. Tidak lancarnya perdagangan antar daerah disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Perdagangan antar wilayah meliputi barang jadi, barang modal, input perantara, bahan baku, material-material lainnya untuk produksi barang dan jasa. Jadi, tidak lancarnya arus barang dan jasa antar daerah mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dan penawaran (Tambunan, 2001).

Menurut Lincolin (dalam Krinantlya, 2014) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di negara-negara yang sedang berkembang, yaitu :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita,

2. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti dengan secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang,
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah,
4. Investasi yang banyak dilakukan pada proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*) persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga menambah jumlah pengangguran,
5. Rendahnya mobilitas sosial,
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha golongan kapitalis,
7. Memburuknya kondisi nilai tukar (*item of trade*) bagi negara yang sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, sebagai akibat ketidakelestarian permintaan negara-negara terhadap ekspor negara yang sedang berkembang,
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain sebagainya.

#### **2.5.4 Dampak Ketimpangan**

Ketimpangan menyebabkan berbagai dampak terhadap daerah dan masyarakat. Adapun yang menjadi dampak dari ketimpangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan. Masyarakat yang berada diwilayah tertinggal pada umumnya masih belum

banyak tersentuh oleh program-program pembangunan sehingga masyarakat tersebut terisolir dari wilayah sekitarnya.

2. Belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh masih banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasinya strategi namun belum dikembangkan secara optimal.

### **2.5.5 Penanggulangan Ketimpangan**

Kebijakan dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi ketimpangan dilakukan sesuai dengan faktor yang menentukan terjadinya ketimpangan pendapatan. Kebijakan yang dimaksudkan di sini adalah upaya pemerintah pusat maupun daerah. Penanggulangan ketimpangan dapat dilakukan dengan beberapa kebijakan diantaranya sebagai berikut (Sjafrizal, 2008) :

#### **1. Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan**

Usaha untuk mendorong kelancaran mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah dapat dilakukan melalui penyebaran pembangunan sarana dan prasarana perhubungan di seluruh pelosok wilayah, prasarana perhubungan yang dimaksud adalah fasilitas jalan, terminal dan pelabuhan laut yang mendorong proses perdagangan antar daerah. Selain itu pemerintah perlu menambahkan jaringan komunikasi dan fasilitas telekomunikasi agar tidak ada daerah yang terisolir. “Bila hal tersebut dilakukan oleh pemerintah, maka ketimpangan akan dapat dikurangi. Karena usaha perdagangan dan mobilitas faktor produksi, sehingga investasi akan lebih lancar” (Sjafrizal, 2008:122).

#### **2. Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan**

“Dari proses transmigrasi dan migrasi spontan ini, kekurangan tenaga kerja yang dilakukan oleh daerah terbelakang akan dapat diatasi sehingga proses pembangunan daerah yang bersangkutan akan cepat digerakan” (Sjafrizal, 2008:123). Dengan adanya transmigrasi dan migrasi spontan akan membantu mengurangi ketimpangan yang terjadi. Hal itu karena migrasi dan transmigrasi akan membantu mendorong pembangunan ekonomi pada setiap daerah sehingga tidak ada perbedaan kondisi pembangunan ekonomi untuk setiap daerah.

### 3. Pengembangan Pusat Pertumbuhan

“Penerapan konsep pusat pertumbuhan dilakukan untuk mendorong proses pembangunan daerah dan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah yang dapat dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan pada pada kota skala kecil dan menengah akan berkembang sehingga kegiatan pembangunan dapat lebih merata ke pelosok daerah” (Sjafrizal,2008:124). Kebijakan ini akan dapat mengurangi ketimpangan karena konsep konsentrasi dan desentralisasi.

### 4. Pelaksanaan Otonomi Daerah

“Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan juga dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan antar wilayah. Dengan adanya dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan daerah termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Adanya kewenangan tersebut maka berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat

untuk menggali potensi daerah akan dapat lebih digerakan” (Sjafrizal,2008:124). Dengan adanya otonomi daerah masyarakat memiliki hak untuk menggali potensi daerah yang dimiliki tanpa harus merasa takut untuk mengeluarkan inisiatif dan aspirasi. Dengan hal tersebut maka, pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat lebih ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan antar wilayah akan dapat dikurangi.

## **2.6 Hubungan Antar Variabel Penelitian**

### **2.6.1 Hubungan PDRB dengan Kemiskinan Perkapita**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus berkembang merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tanpa beriringan dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan (*ceteris paribus*), dimana akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan (Tambunan, 2003:40-41). Menurut Kuncoro pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Berikutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga

miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Menurut Kuznet (Tulus Tambunan, 2003:89), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada waktunya mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

Selanjutnya menurut penelitian Hermanto Siregar dan Dwi W (2008:34) dari hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah penduduk miskin, artinya bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

### **2.6.2 Hubungan Gini Ratio dengan kemiskinan perkapita**

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Felix Naschold pada tahun 2002 yang berjudul "*Why Inequality Matters for Poverty*" bahwa pengaruh ketimpangan terhadap kemiskinan dapat diketahui secara tidak langsung melalui pertumbuhan, dengan melihat bagaimana pengaruh ketipangan terhadap pertumbuhan kita dapat mengetahui hal tersebut dan dengan melihat hasil penelitian yang dikemukakan oleh Galor Moav (2004) bahwa dalam jangka pendek hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yaitu positif, sedangkan dalam jangka panjang hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan yaitu negatif .

### **2.6.3 Hubungan Pendidikan dengan Kemiskinan Perkapita**

Todaro (1994) mengemukakan bahwa selama beberapa tahun, sebagian besar penelitian dibidang ilmu ekonomi baik dinegara-negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, keterkaitan di titik beratkan pada pendidikan, produktivitas tenaga kerja, dan tingkat output. Hal tersebut tidak aneh karena sasaran utama pembangunan di tahun 1950-an dan 1960-an yaitu memaksimalkan tingkat pertumbuhan output total. Oleh karena itu dampak pendidikan atas distribusi pendapatan dan usaha menghilangkan kemiskinan absolut sebagian besar telah dilupakan. Berikutnya Todaro (2000) menyatakan bahwa pendidikan merupakan sebuah tujuan pembangunan mendasar, sebagaimana pendidikan memegang peran kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar dapat terciptanya pertumbuhan serta pembangunan berkelanjutan.

Menurut Simmons (dikutip dari Todaro, 1994), pendidikan pada banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Dimana digambarkan dengan seseorang miskin mengharapkan pekerjaan baik serta penghasilan yang tinggi maka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi pendidikan tinggi hanya mampu dicapai oleh orang kaya. Sedangkan orang miskin tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai pendidikan hingga ketingkat yang lebih tinggi seperti sekolah lanjutan dan universitas, sehingga tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam mengatasi kemiskinan.

### **2.7 Studi Terkait**

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hatta dan Abdul Azis (2017) mengenai analisis faktor Determinan Tingkat Kemiskinan di Indonesia 2005-2015. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi berganda, dengan OLS. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel IPM berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan, variabel inflasi berpengaruh negative namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel gini ratio berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan, dan juga dependensi ratio berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Boy Stompul (2020) mengenai Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pendapatan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat kemiskinan (Studi Kasus Kota Medan). Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik, uji asumsi klasik merupakan suatu keharusan dalam penelitian regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan Nilam I.S, Dwi S, dan Syamsul H (2017) mengenai Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan (studi kasus Kabupaten/Kota di Jawa Timur). Penelitian dilakukan di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang bertujuan

untuk mengembangkan dan menggunakan data sekunder yang bertujuan untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis (analisis). Hasil penelitian menunjukkan variabel alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel belanja dana desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan variabel produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan Wahyuningsih Y.E dan Zamzami Z (2014) mengenai Analisis Pengaruh PDRB, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, metode penelitian metode analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan variabel PDRB berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan jumlah penduduk berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Asih H (2018) mengenai Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan (studi kasus di Kabupaten Bojonegoro). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskripsi jenis data yaitu sekunder diambil dari Badan pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan variabel pengangguran berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel kesehatan menunjukkan hubungan yang negatif terhadap tingkat kemiskinan, dan variabel pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.